

Booklet

Katalog BPS : 4601010.82



**INDEKS DEMOKRASI INDONESIA**  
**PROVINSI MALUKU UTARA 2014**

*Tantangan Bagi Kebebasan Sipil*

<http://malukubps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

Booklet



**INDEKS DEMOKRASI INDONESIA**  
**PROVINSI MALUKU UTARA 2014**  
*Tantangan Bagi Kebebasan Sipil*

<http://malukutms.gov.id>



**Booklet**  
**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara 2014**  
**Tantangan Bagi Kebebasan Sipil**

Katalog BPS : 4601010.82  
No. Publikasi : 82520.1601  
Jumlah Halaman : iV + 23 Halaman  
Ukuran Booklet : 14,8 cm x 21 cm  
Naskah : Seksi Statistik Ketahanan Sosial  
Penyunting : Bidang Statistik Sosial  
Desain Kulit : Bidang Statistik Sosial  
Dicetak oleh : BPS Provinsi Maluku Utara  
Diterbitkan oleh : © BPS Provinsi Maluku Utara  
Tahun : 2016

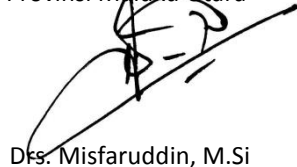
## KATA PENGANTAR

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terbentuk dari tiga Aspek utama yaitu Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*), dengan sebelas variabel dan 28 indikator. BPS Provinsi Maluku Utara mempublikasikan perkembangan setiap aspek, variabel, dan indikator yang terjadi di Maluku Utara selama 2014 dalam sebuah booklet dengan judul Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara 2014, Tantangan Bagi Kebebasan Sipil.

Booklet ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik untuk bahan perencanaan, monitoring maupun bahan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan demokrasi di Maluku Utara.

Disadari sepenuhnya bahwa penyajian Booklet ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan booklet yang akan datang. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan booklet ini, disampaikan terima kasih.

Ternate, Februari 2016  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Maluku Utara



Drs. Misfaruddin, M.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Apakah IDI?.....	1
Mengapa IDI Diperlukan? .....	2
Apakah Manfaat IDI?.....	3
Aspek, Variabel dan Indikator IDI.....	4
Metodologi IDI.....	6
Wajah Demokrasi Maluku Utara.....	7
Potret Kebebasan Sipil di Maluku Utara.....	11
Sudahkah Hak-hak Politik Masyarakat Terpenuhi?.....	13
Peran Lembaga Demokrasi terhadap Demokrasi di Maluku Utara.....	15
Penutup.....	17
Lampiran.....	19

## Apakah IDI?

Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI merupakan sebuah alat ukur empirik dan obyektif terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di tanah air. IDI merupakan pengukuran yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. Kegiatan penyusunan Indeks IDI dilaksanakan sejak tahun 2009 yang dinahkodai oleh Bappenas, didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), serta

pemerintah provinsi dan dalam prosesnya melibatkan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dari seluruh Indonesia.

Dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya, IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia. Secara makro, kekhasan yang dimaksud yaitu terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode pasca-Soeharto (periode reformasi).

IDI diharapkan menjadi rujukan, baik dalam melakukan kajian-kajian akademis maupun dalam memformulasikan kebijakan dan program pembangunan politik. Terkait dengan formulasi kebijakan dan pembangunan politik, IDI sudah seharusnya dikaitkan dengan tindak lanjut yang konkrit.

## Mengapa IDI diperlukan?

Setelah berakhirnya Orde Baru, terbuka kesempatan bagi Bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi penyelenggaraan Negara. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya, karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lain yang lebih tepat untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter.

Masyarakat kian peka terhadap praktek-praktek dan seluruh penyelenggaraan pemerintah yang tidak benar dan dianggap merugikan rakyat.

Dalam upaya menyikapi perkembangan politik inilah yang kemudian mengharuskan pemerintah untuk dapat bersikap lebih tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam masa transisi demokrasi yang besar ini, tentunya pemerintah baik di level nasional maupun daerah sangat perlu untuk mengetahui sejauh mana demokrasi berkembang dan telah diterapkan di seluruh wilayah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Untuk itulah IDI lahir sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan data yang dapat memberikan gambaran secara utuh terhadap kondisi demokrasi di tanah air.

## Apakah Manfaat IDI?

1

Secara akademis, IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di tingkat provinsi di seluruh wilayah Indonesia. IDI memberikan data penting dengan tolak ukur jelas bagi keperluan studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.

2

IDI bermanfaat bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang.

3

Secara keseluruhan, IDI bermanfaat dalam evaluasi pelaksanaan demokrasi di daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk menindaklanjuti hasil IDI.



# Aspek, Variabel dan Indikator IDI

3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator IDI

## A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)

### I. Kebebasan berkumpul dan berserikat

- 1 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- 2 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

### II. Kebebasan berpendapat

- 3 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
- 4 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

### III. Kebebasan berkeyakinan

- 5 Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
- 6 Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
- 7 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

### IV. Kebebasan dari diskriminasi

- 8 Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
- 9 Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
- 10 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

## 3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator IDI

**B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)**

## V. Hak memilih dan dipilih

- 11 Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
- 12 Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
- 13 Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
- 14 Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*)
- 15 Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD

## VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

- 16 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
- 17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

**C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)**

## VII. Pemilu yang bebas dan adil

- 18 Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
- 19 Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

## VIII. Peran DPRD

- 20 Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
- 21 Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan
- 22 Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

## IX. Peran Partai politik

- 23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
- 24 Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

## X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

- 25 Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif
- 26 Keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif

## XI. Peran Peradilan yang independen

- 27 Keputusan hakim yang kontroversial
- 28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

# Metodologi IDI

## Telaah Media dan Dokumen

Media dan dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif berkaitan dengan IDI. Media yang digunakan adalah surat kabar (koran), sedangkan dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian dan data pemilih dari KPUD.

## Focus Group Discussion (FGD)

FGD memiliki peranan penting dalam upaya untuk meminimalkan “bias” dari informasi yang dijangar melalui telaah media dan dokumen. Melalui FGD, didapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan berupa verifikasi, konfirmasi dan diskonfirmasi atas data-data kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui telaah media dan dokumen. Selain itu FGD juga berfungsi untuk menggali data-data yang mungkin luput diberitakan media.

## Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam bersifat komplementer karena melengkapi telaah media dan dokumen serta FGD. Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh dari telaah media dan dokumen serta FGD. Narasumber dapat berasal dari FGD yang aktif memberikan masukan dan klarifikasi terhadap berita maupun kasus-kasus yang ditemukan baik dalam telaah media maupun dokumen.

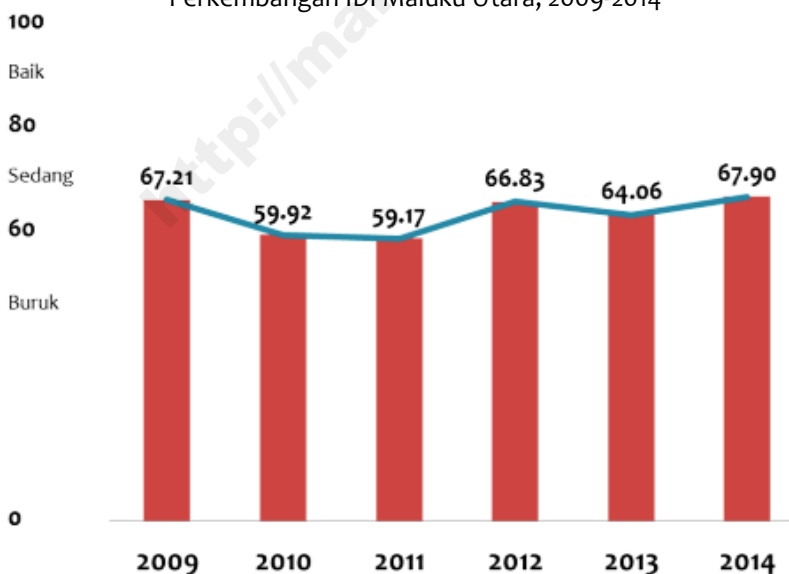
## Wajah Demokrasi Maluku Utara

*Perkembangan IDI*

Perkembangan IDI Maluku Utara dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,21; 2010 sebesar 59,92; 2011 sebesar 59,17; 2012 sebesar 66,83; 2013 sebesar 64,06, dan 2014 sebesar 67,90). Hal ini menandakan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi. Tingkat demokrasi Maluku Utara selama tahun 2010 hingga 2011 sempat

Grafik 1.

Perkembangan IDI Maluku Utara, 2009-2014



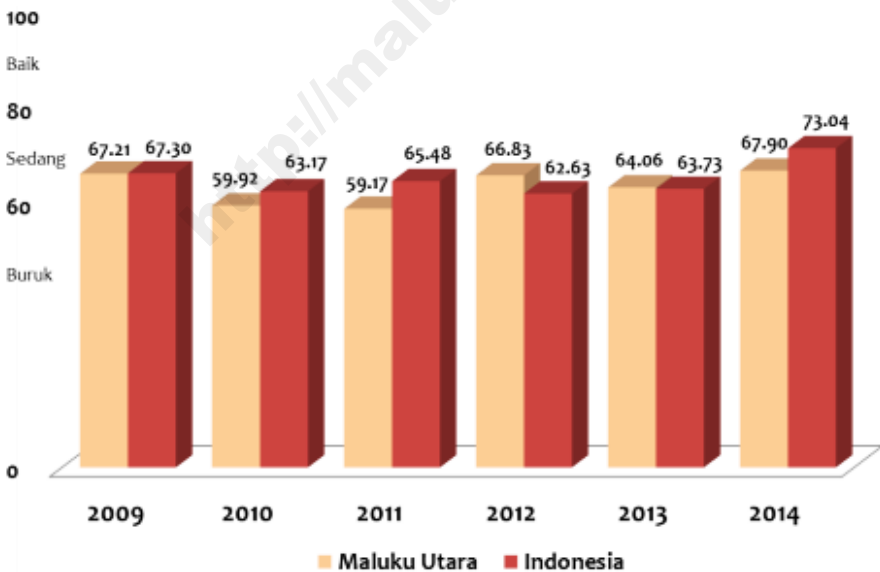
masuk dalam kategori “buruk”, namun dalam tiga tahun pengukuran IDI terakhir berada pada kategori “sedang”.

Jika dibandingkan dengan IDI Indonesia (nasional) pada tahun 2014 yang sebesar 73,04 IDI Maluku Utara memiliki nilai indeks yang lebih rendah yaitu sebesar 67,90. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika

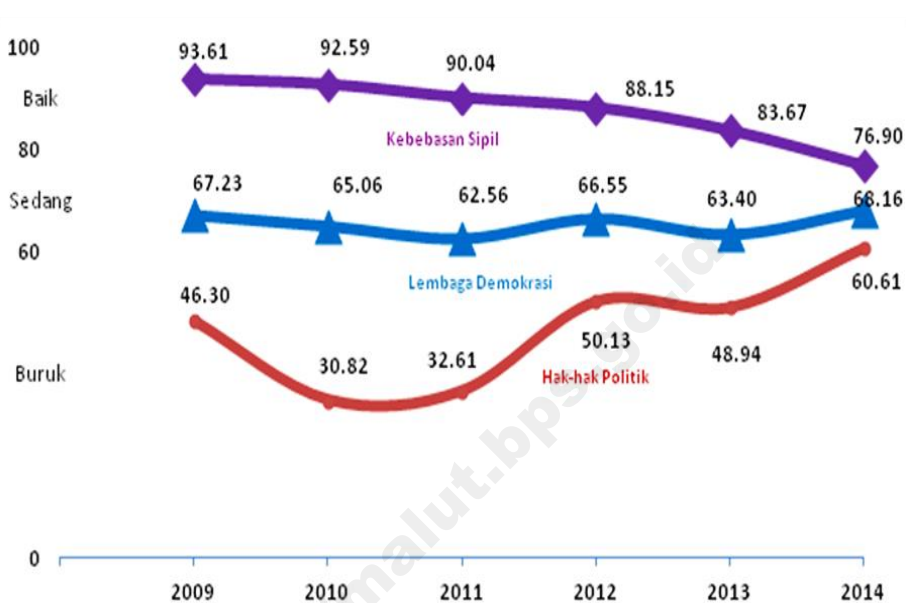
perkembangan demokrasi di Maluku Utara lebih lambat dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013 (64,06), IDI Maluku Utara mengalami kenaikan 3,84 poin. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dinamika demokrasi di Maluku Utara pada tahun 2014.

Grafik 2.  
Perkembangan IDI Maluku Utara dan Indonesia, 2009-2014



Grafik 3.  
Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku Utara, 2009-2014



Angka IDI Maluku Utara 2014 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek, yakni aspek kebebasan sipil dengan skor 76,90; aspek hak-hak politik sebesar 60,61; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 68,16.

Selama enam tahun pengukuran IDI (2009-2014), dua dari tiga aspek demokrasi yang

diukur yaitu aspek hak-hak politik dan aspek lembaga-lembaga demokrasi terlihat fluktuatif tetapi cenderung naik. Pada tahun 2014, kedua aspek ini mengalami kenaikan masing-masing sebesar 11,67 poin dan 4,76 poin. Sementara kebebasan sipil pada pengukuran 2009-2014 menempati skor tertinggi tetapi

cenderung menurun. Pada tahun 2014, aspek yang satu ini turun sebanyak 6,77 poin mencapai nilai 76,90.

Pola sebaran nilai ketiga aspek di atas bergeser dari tahun pengukuran sebelumnya, yaitu aspek kebebasan sipil yang selama lima tahun pengukuran (2009-2013) kategori “baik”, pada tahun 2014 berubah menjadi kategori “sedang”, dan aspek hak-hak politik yang terkategori “buruk” selama lima tahun pengukuran, tahun 2014 bergeser menjadi kategori “sedang”. Sementara aspek lembaga-lembaga demokrasi posisinya stabil dengan kategori “sedang” selama enam tahun pengukuran (2009-2014).

Dari data IDI 2014 diperoleh informasi bahwa pada aspek kebebasan sipil masih terdapat ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat yang menghambat

kebebasan berpendapat. Begitu pula dalam kebebasan berkumpul dan berserikat masih terdapat ancaman kekerasan oleh aparat pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga terdapat ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

Pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah.



RUSUH LAGI : Aksi demo yang berakhir ricuh.

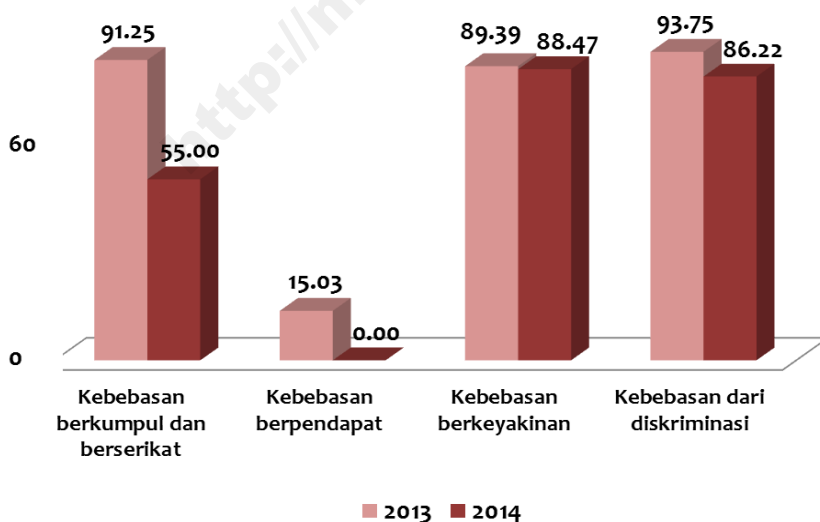
Sumber: Malut Post, 20 November 2014

## Potret Kebebasan Sipil di Maluku Utara

Penurunan aspek kebebasan sipil di Maluku Utara pada tahun 2014 diakibatkan oleh menurunnya nilai indeks variabel-variabel kebebasan sipil. Seluruh variabel kebebasan sipil mengalami penurunan.

Pada grafik 4, dapat dilihat bahwa Indeks Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu dari

Grafik 4.  
Indeks Variabel Kebebasan Sipil IDI Maluku Utara Tahun 2013 dan 2014





91,25 menjadi 55,00. Disusul oleh variabel kebebasan berpendapat yang pada tahun 2014 ini memiliki poin terendah, yaitu 0,00. Sedangkan variabel kebebasan dari diskriminasi mengalami penurunan nilai indeks sebesar 7,53 poin menjadi 86,22. Variabel kebebasan berkeyakinan mengalami penurunan yang paling kecil yaitu 0,92 poin menjadi 88,47.

Menurunnya indeks kebebasan sipil disebabkan oleh beberapa kejadian dimana sekelompok masyarakat ataupun aparat melakukan aksi pembubaran terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Hal ini terjadi di beberapa daerah di Maluku Utara selama tahun 2014.

Variabel kebebasan berpendapat memperoleh indeks terendah karena sepanjang tahun 2014 terjadi ancaman kekerasan serta penggunaan kekerasan baik yang

dilakukan oleh aparat maupun kelompok masyarakat tertentu yang menghambat kebebasan berpendapat.

Penurunan indeks variabel kebebasan berkeyakinan pada tahun 2014 terjadi akibat beberapa konflik yang mengatasnamakan agama di beberapa wilayah Maluku Utara. Selain itu, himbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan ibadah merupakan salah satu pemicu menurunnya indeks variabel kebebasan berkeyakinan.

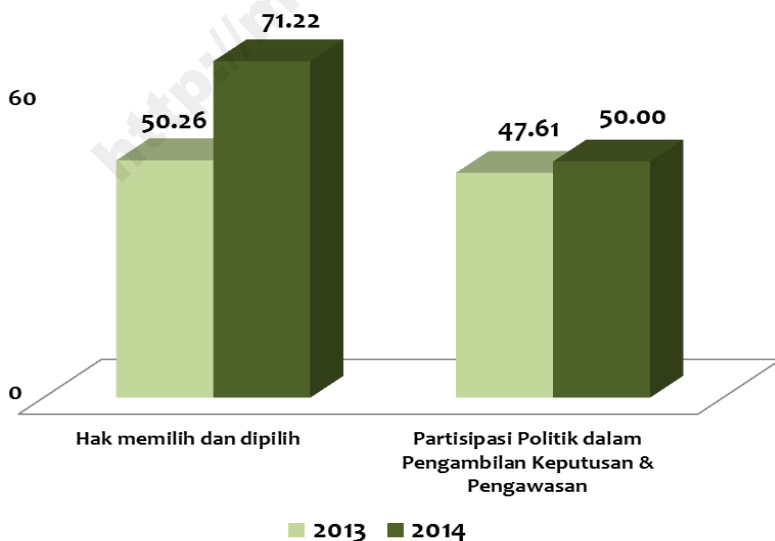
Indeks variabel kebebasan dari diskriminasi pun mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat diskriminasi di dalam masyarakat. Diskriminasi yang sering terjadi yaitu diskriminasi kesukuan dan hal ini cenderung bersamaan dengan kegiatan kampanye pemilihan umum legislatif.

## Sudahkah Hak-hak Politik Masyarakat Maluku Utara Terpenuhi?

Sejalan dengan Aspek Hak-hak politik pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan, indeks variabel-variabel pada aspek ini pun meningkat seluruhnya. Pada grafik 5, Indeks Variabel hak memilih dan dipilih meningkat dari 50,26 di tahun 2013 menjadi 71,22 di tahun 2014. Demikian pula dengan indeks variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan meningkat menjadi 50,00 di tahun 2014.

Grafik 5.

Indeks Variabel Hak-hak Politik IDI Maluku Utara Tahun 2013 dan 2014



Peningkatan indeks pada variabel-variabel dari aspek hak-hak politik memberikan kontribusi terhadap peningkatan IDI Maluku Utara tahun 2014. Seluruh variabel mengalami kenaikan poin cukup besar sehingga mendorong indeks secara keseluruhan.

Jika ditelaah lebih mendalam, kenaikan indeks variabel-variabel hak politik disumbang oleh respon positif terhadap beberapa indikator yang menjadi acuan pengukuran. Misalnya, pada indikator ke-11 (Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat) yang bernilai 100, artinya bahwa hak pilih masyarakat terakomodir dengan baik dengan tidak adanya hambatan dalam menyalurkan hak memilih ataupun dipilih.

Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan legislatif 2014 cukup baik sehingga

memiliki andil terhadap peningkatan indeks. Data DPT untuk Maluku Utara dinilai cukup akurat dan presisi sesuai jiwa pemilih di lapangan. Selain itu tentunya data DPT dapat dipertanggung jawabkan.

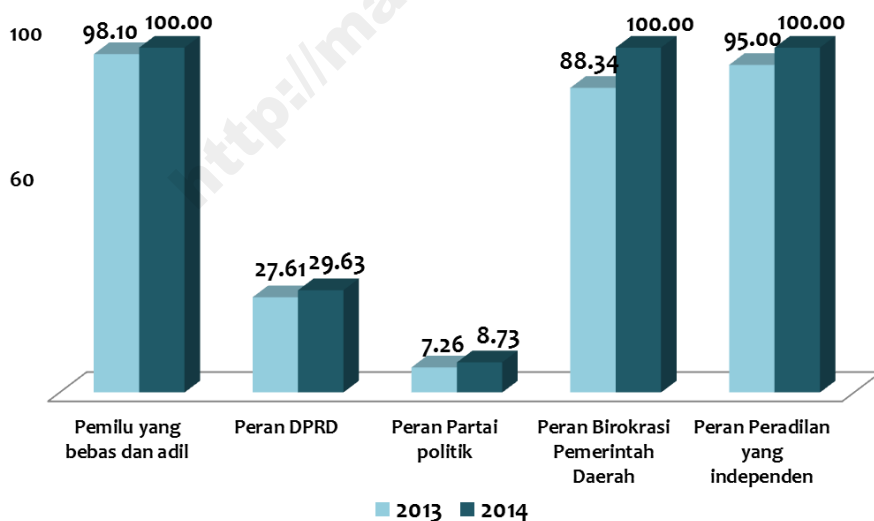
Di sisi lain, masyarakat Maluku Utara semakin memahami makna dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Hampir setiap hari ditemui pemberitaan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk aduan atau penyuaran opini. Semakin banyak pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan maka semakin baik nilai indeks yang dicapai. Hal tersebut mencerminkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin baik dan aktif.

## Peran Lembaga Demokrasi terhadap Demokrasi di Maluku Utara

Pada grafik 6 terlihat bahwa indeks variabel-variabel pada aspek lembaga demokrasi mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada variabel peran birokrasi pemerintah daerah dari 88,34 di tahun 2013 menjadi 100,00 di tahun 2014. Sedangkan variabel peran partai politik mengalami kenaikan indeks terkecil yaitu dari 7,26 di tahun 2013 menjadi 8,73 pada 2014.

Grafik 6.

Indeks Variabel Lembaga Demokrasi IDI Maluku Utara Tahun 2013 dan 2014



Terdapat tiga variabel yang memperoleh indeks 100 atau sangat baik. Variabel-variabel tersebut yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen. Diharapkan capaian ini agar dipertahankan sehingga mendorong peran lembaga demokrasi menjadi lebih baik lagi.

Kenaikan variabel-variabel tersebut mendorong kenaikan pada aspek lembaga demokrasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja lembaga demokrasi secara keseluruhan pada tahun 2014 relatif lebih baik dibandingkan tahun 2013.

Jika dibandingkan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dapat dilihat bahwa kinerja lembaga eksekutif terhadap demokrasi di Maluku Utara cenderung lebih baik. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan kepatuhan terhadap

peraturan yang mengikat aparatur sipil untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan kampanye politik. Kemudian, dalam kurun waktu 2014 tidak ada putusan lembaga pengadilan atau penghentian penyidikan oleh jaksa atau polisi yang kontroversial.

Sementara itu, kinerja lembaga legislatif belum meningkat secara signifikan. Sebagai wakil rakyat, DPRD belum optimal dalam mengajukan usulan Perda inisiatif maupun rekomendasi resmi kepada pemerintah.

Sedangkan peran partai politik dalam pembinaan pendidikan demokrasi juga tidak maksimal yang diindikasikan dengan minimnya kaderisasi yang dilakukan di tingkat provinsi. Selain itu, partai politik juga belum mengoptimalkan peran serta perempuan dalam kepengurusan parpol pada tingkat provinsi.

## Penutup

Keberhasilan pembangunan di sektor politik tidak lepas dari segala upaya yang dilakukan baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Sistem pemerintahan yang di anut oleh bangsa Indonesia, yakni demokrasi diyakini dapat membawa seluruh elemen bangsa mencapai cita-cita dan keberhasilan tersebut. Berbagai hal dan dinamika politik terjadi di tengah-tengah penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Namun semua

kembali pada tujuan bangsa tersebut, yaitu cita-cita bersama.

Penerapan demokrasi pasca runtuhnya rezim orde baru memberi asa dan semangat baru dalam membangun bangsa ini. Sejauh mana penerapan demokrasi di Indonesia diukur dengan IDI. IDI merepresentasikan aspek-aspek utama penerapan demokrasi. Kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi merupakan tiga aspek utama penyelenggaraan negara yang berkiprah pada sistem demokrasi.

Data IDI merupakan gambaran umum penerapan demokrasi di Indonesia. Pemerintah dapat merujuk pada data IDI untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan di bidang politik. Selain itu pihak legislatif dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dari segi penerapan hukum dan pelayanan publik yang demokratis.

Menurunnya indeks aspek kebebasan sipil di Maluku Utara pada tahun 2014 sekiranya menjadi perhatian semua pihak. Kebebasan sipil merupakan salah satu wujud penerapan demokrasi dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ancaman hingga penggunaan kekerasan masih sering terjadi dan menjadi tajuk utama pemberitaan media di Maluku Utara. Aparat yang seharusnya mengayomi dan sekelompok orang tertentu ternyata masih melakukan tindakan yang mencederai nilai kebebasan sipil. Diskriminasi yang berbau SARA seakan makin menjamur di tahun 2014.

Berbagai tindakan yang melanggar kebebasan sipil harus dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah diharapkan dapat dengan tegas menegakkan hukum yang menyangkut persoalan kebebasan sipil dan juga

persoalan lain. Selanjutnya, melalui pendidikan, pemerintah dapat memberikan pemahaman terkait makna demokrasi, kebebasan sipil, dan etika bermasyarakat.

Secara kelembagaan, diharapkan legislatif maupun partai politik dapat meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan demokrasi. Masing-masing lembaga tersebut agar berjalan sesuai tugas dan fungsinya. DPRD agar secara periodik mengajukan rekomendasi kepada pemerintah secara resmi serta mengajukan rancangan Perda atas inisiatif sendiri.

Aspek hak-hak politik merupakan aspek yang memiliki indeks terbaik dalam pengukuran IDI Maluku Utara tahun 2014. Hak-hak politik seperti hak memilih, dipilih, serta pengawasan pengambilan keputusan telah berjalan dengan baik.

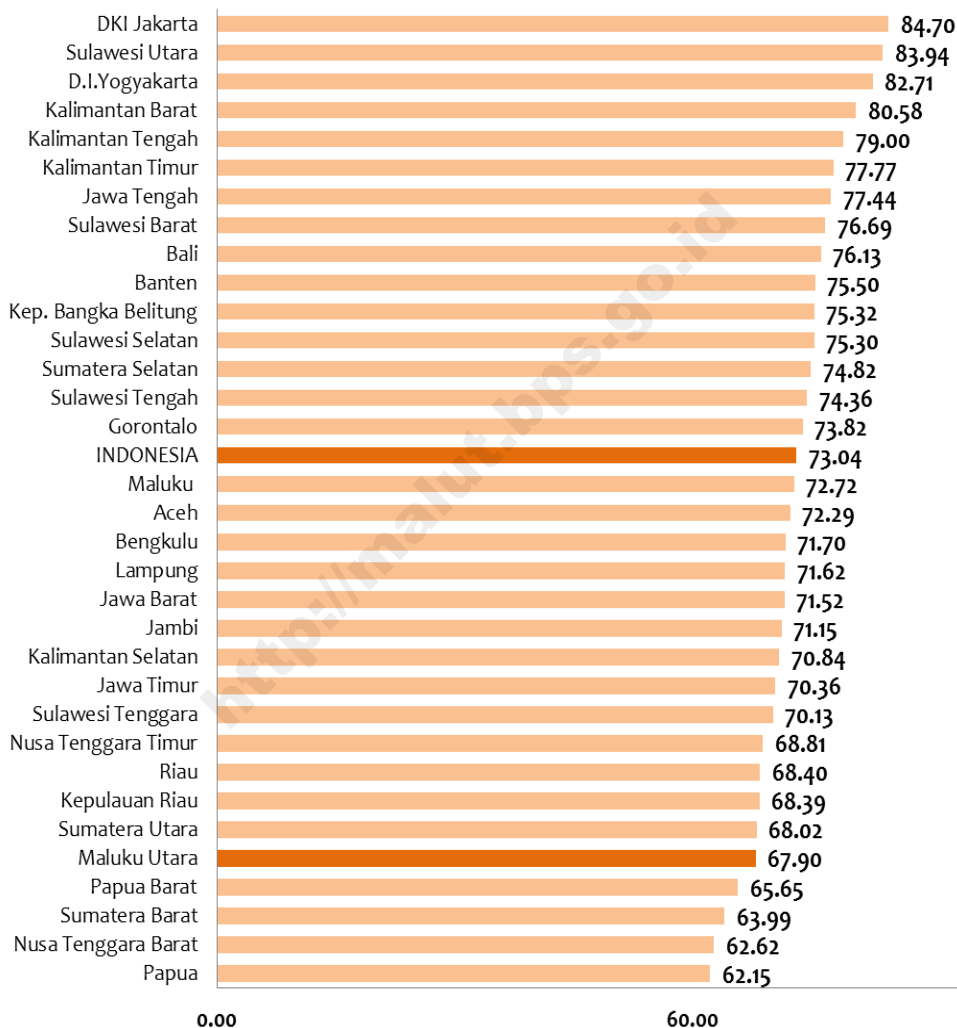


# Lampiran

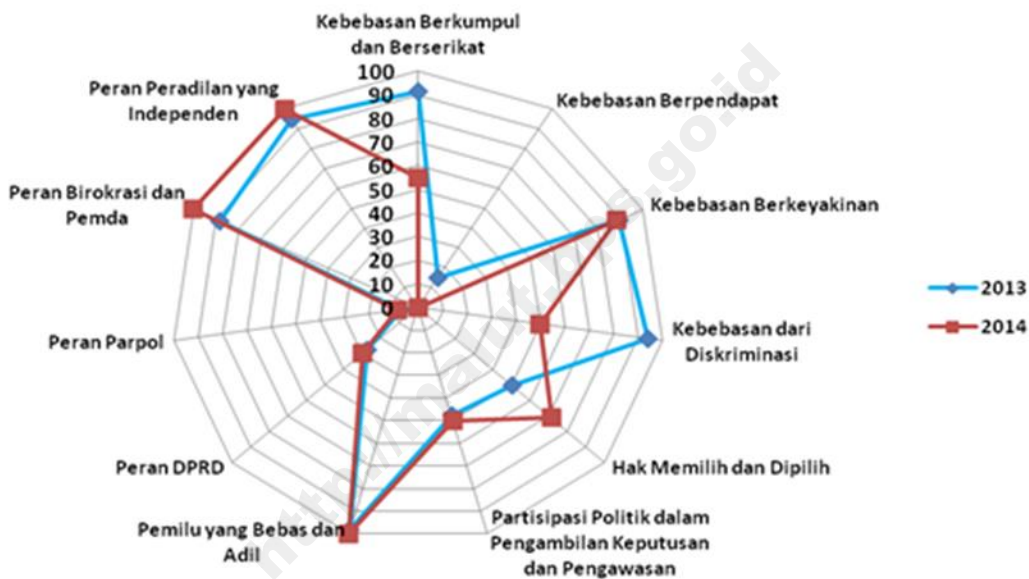
<http://malut.ms.go.id>



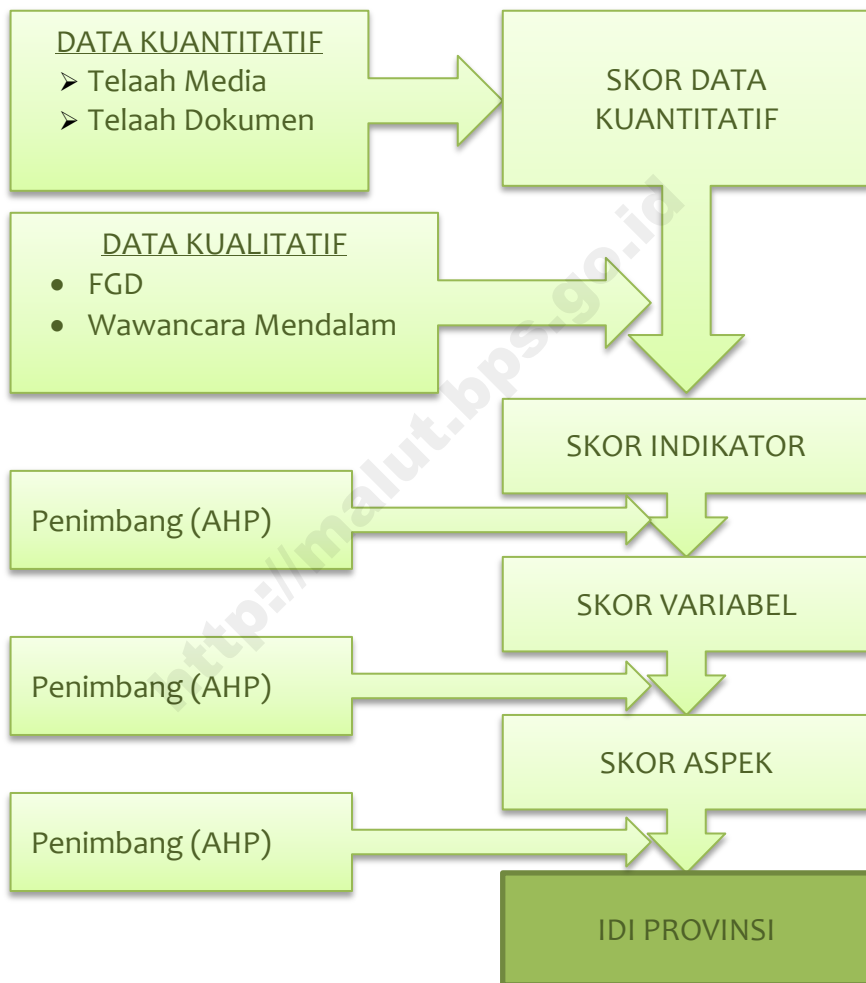
Lampiran 1  
Capaian Kinerja Demokrasi Maluku Utara di Tingkat Nasional  
Tahun 2014



Lampiran 2  
Perkembangan Variabel IDI Provinsi Maluku Utara  
Tahun 2013 dan 2014



Lampiran 3  
Proses Penghitungan IDI



Lampiran 4  
Tim Panel Ahli dan Juri AHP Penyusunan IDI 2014

Tim Panel Ahli

No.	Nama	Lembaga/Aktivitas
1.	Prof. Dr. Maswadi Rauf	FISIP Universitas Indonesia
2.	Dr. Syarif Hidayat	LIPI
3.	Dr. Abdul Malik Gismar	LSM Kemitraan
4.	Prof. Dr. Siti Musdah Mulia	ICRP ( <i>Indonesian Conference on Religion and Peace</i> )

Juri Ahli *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP)

No.	Nama	Lembaga/Aktifitas
1.	Dra. Valina Singka Subekti, M.Si	Staf Pengajar FISIP UI
2.	Drs. Andrinof Chaniago, M. Si	Staf Pengajar FISIP UI
3.	Ita Fathia Nadia	Aktivis Perempuan
4.	Erna Ratnaningsih	YLBHI
5.	Anwar Ma'ruf	Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia
6.	Rustam Ibrahim	Ketua Pokja Akuntabilitas LSM
7.	Dr. Made Suwandi, M. Soc. Sc.	Staf Ahli Kemendagri
8.	Dr. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc	Sekjen DPD RI
9.	Letjen (Purn) Agus Widodo	Purnawirawan TNI
10.	Dr. Ir. Andi Yuliani Paris, M.Sc	Politisi PAN
11.	Nurul Arifin	Politisi Golkar
12.	Indah Nataprawira	Megawati Institute
13.	HM. Nasir Djamil	Politisi PKS
14.	Bestian Nainggolan	Litbang Kompas

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**Jl. Stadion No.65, TernateTelp.: (0921) 3127878 Fax.: (0921) 3126301**

**Homepage: [http:// malut.bps.go.id](http://malut.bps.go.id) Email: [malut@bps.go.id](mailto:malut@bps.go.id)**